

**TINJAUAN TENTANG FUNGSI *BUDGETING* DEWAN PERWAKILAN
DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA
PERWAKILAN DALAM MENCIPTAKAN *CHECK AND BALANCES***



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Oleh :

ADHELA KURNIARTHA SEKAR ARUM

NIM. E0011005

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2015

con i ser

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN TENTANG FUNGSI *BUDGETING* DEWAN PERWAKILAN
DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA
PERWAKILAN DALAM MENCIPTAKAN *CHECK AND BALANCES***

Oleh :

ADHELA KURNIARTHA SEKAR ARUM

NIM. E0011005

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta, 16 Maret 2015

Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing I



Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum.
NIP. 197805012003121002

Pembimbing II



M. Madalina, S.H., M.Hum
NIP. 196010241986022001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN TENTANG FUNGSI *BUDGETING* DEWAN PERWAKILAN
DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA
PERWAKILAN DALAM MENCIPTAKAN *CHECK AND BALANCES***

ADHELA KURNIARTHA SEKAR ARUM

NIM. E0011005

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 6 April 2015

DEWAN PENGUJI

1. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. : 


NIP. 197006212006042001

Ketua

2. M. Madalina, S.H., M.Hum : 

NIP. 196010241986022001

Sekretaris

3. Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. : 

NIP. 197805012003121002

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. Hartwiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19570203 1985032001

PERNYATAAN

Nama : Adhela Kurniartha Sekar Arum

NIM : E0011005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **TINJAUAN TENTANG FUNGSI *BUDGETING* DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DALAM MENCIPTAKAN *CHECK AND BALANCES*** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 16 Maret 2015

Yang membuat pernyataan



Adhela Kurniartha Sekar Arum
NIM. E0011005

MOTTO

“Komitmen, Konsisten, Konsekuen“

- **Agus Artha** -

“Apa yang kamu tabur akan kamu tuai”

“Keberhasilan anak bergantung pada restu orang tua”

“Bersyukur, tidak perlu iri dengan rezeki orang lain, apapun yang kamu dapat dalam hidupmu sudah diatur Allah di waktu yang tepat”

“Pada dasarnya manusia berada di titik yang sama, namun ada manusia yang sadar bahwa hidup ini seperti menaiki anak tangga yang dalam prosesnya berujung di puncak, dan puncak itu disebut keberhasilan”

- **Penulis** -

“Maafkanlah musuh-musuh anda, tapi jangan pernah melupakan nama-namanya”

- **John F. Kennedy** -

“No one can make you feel inferior without your consent”

- **Eleanor Roosevelt** -

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT serta Rasulullah SAW dan para Sahabatnya yang telah memberikan nikmat dan Karunia-Nya sehingga memudahkan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
- Babe, Mami, dan Adik yang selalu memotivasi dan mendoakan untuk kelancaran Penulisan Hukum (Skripsi) ini serta dukungan yang tidak pernah berhenti.
- Sahabat terkasih yang selalu memotivasi Penulis dalam menuntaskan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
- Sahabat-sahabat dalam berproses bersama Penulis yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan serta semangat yang tak pernah henti dalam meraih cita.
- Kawan-kawan KSP “Principium” FH UNS yang selalu membantu dan memberi dukungan kepada Penulis untuk selalu berproses.
- Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberi ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan yang sesungguhnya.

ABSTRAK

ADHELA KURNIARTHA SEKAR ARUM, E0011005. 2015. TINJAUAN TENTANG FUNGSI *BUDGETING* DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DALAM MENCIPTAKAN *CHECK AND BALANCES*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi *budgeting* Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga perwakilan dalam menciptakan *check and balances*, sebagaimana diketahui bahwa selama ini DPD RI tidak mempunyai kekuasaan yang memadai. Kewenangan DPD RI berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya terbatas pada kekuasaan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di luar itu, kekuasaan DPD RI hanya memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Sumber hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi pustaka atau studi dokumen dengan analisis bahan hukum yang menggunakan penafsiran atau interpretasi hukum dan silogisme metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan adanya simpulan bahwa peranan DPD terkait dengan fungsi *budgeting* (anggaran) berupa memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN (Pasal 22D ayat (2), dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN yang hasilnya disampaikan kepada DPR untuk bahan pertimbangan (Pasal 22D ayat (3) UUD NRI 1945). Keberadaan DPD yang hanya sebagai penunjang (*budget influencing*) terhadap fungsi DPR RI ini tentunya tidaklah tepat untuk ketatanegaraan Indonesia. Penguatan DPD RI menjadi sangat *urgent* untuk dilakukan karena dengan penguatan kewenangan DPD RI tersebut aspirasi daerah akan terwakili dengan lebih maksimal dalam rangka menjaga proporsionalitas keterwakilan politik dan keterwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci : Fungsi *budgeting*, Dewan Perwakilan Daerah, Lembaga Perwakilan, *Check and balances*

ABSTRACT

ADHELA KURNIARTHA SEKAR ARUM, E0011005. 2015. A STUDY ON THE BUDGETING FUNCTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA'S LOCAL REPRESENTATIVE ASSEMBLY (DPD) AS THE REPRESENTATIVE AGENCY IN CREATING CHECK AND BALANCES. Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This research aimed to find out the budgeting function of the Republic of Indonesia's Local Representative Assembly (DPD RI) as the representative agency in creating check and balances. As has been known, DPD RI does not have adequate power so far. The authority of DPD RI, according to the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, Article 22 D, is limited to the power related to local autonomy, central-local relationship, local area establishment and expansion as well as integration, management of natural resource and other economic resource, and the central and local financial balance problem. In addition, the DPD RI's power only gives consideration to the Republic of Indonesia's Legislative Assembly (DPR RI).

This study was a normative law research that was prescriptive in nature using statute, conceptual, historical, and comparative approaches. The legal source used derived from primary and secondary law materials. Technique of collecting law material used was library study or document study with legal interpretation and deductive syllogism method as the technique of analysis.

Considering the result of research and discussion, it could be concluded that the role of DPD was related to budgeting function constituting the consideration to DPR over RUU APBN (Article 22D clause (2), and could undertake supervision over the implementation of APBN, the result of which was conveyed to DPR for the matter of consideration (Article 22D clause (3) of 1945 Constitution). The existence of DPD only serving as supporting factor (budget influencing) to the function of DPR RI was not appropriate to Indonesian state structure. The reinforcement of DPD RI became very urgent to do because through the reinforcement of DPD RI's authority, the local aspiration could be represented more maximally in the attempt of maintaining the political representativeness proportionality and local representativeness in Indonesian state structure.

Keywords: Budgeting Function, Local Representative Assembly, Representative Institution, Check and Balances.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul: Tinjauan tentang Fungsi *Budgeting* Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sebagai Lembaga Perwakilan Dalam Menciptakan *Check and Balances* dapat terselesaikan.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini membahas mengenai makna fungsi *budgeting* Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bagaimana upaya optimalisasi fungsi *budgeting* Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan dalam menciptakan *check and balances*.

Terselesainya Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan, dukungan, saran, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang senantiasa memberikan arahan dan pembelajaran yang begitu berharga selama membimbing Penulis.
2. Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, senantiasa memberikan arahan dan saran, serta mengajarkan ketelitian selama membimbing Penulis.
3. M. Madalina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan arahan dan masukan selama membimbing Penulis.
4. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi).
5. Moch. Najib Imanullah, M.H., Ph.D. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala dedikasinya dalam memberikan ilmu terhadap seluruh mahasiswa, termasuk Penulis.

7. Seluruh Karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu segala kepentingan Penulis selama studi
8. Babe dan Mami tercinta, Agus Yulianto, S.PT dan Mimin S. yang tiada hentihentinya memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan baik moril maupun materiil, serta memberikan pelajaran hidup yang berharga yang mampu menjadi bekal dan kekuatan dalam menjalankan kehidupan.
9. Adikku yang tiada hari melewatkan omelanku, Adilia Nadiartha Sekar Arum, yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan dukungan.
10. Bayu Wijanarko, S.H. , sahabat terkasih yang selalu menjadi teman diskusi yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat sehingga Penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
11. Sahabat cimi-cimiku, Cahyanita Dyah P. dan Taufik Adi yang selalu menghibur dan memberikan dukungan Penulis dikala menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
12. Para Sahabat terbaikkku, Elza Aulia , Erin Putri Kurniawan, Wulandari , Resti Dian L. , dan Dikta Angga Bhijana. terima kasih sudah bersama-sama Penulis sejak masa orientasi hingga saat ini dan terima kasih untuk doa dan semangat yang selalu diberikan hingga terselesaikannya Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
13. Sahabatku CRCC Cahyanita Dyah P, Nisakhaira Rahmaningtyas, Mufida Amalia S., Annita Nur K., dan Pradevi Anggi yang selalu memberikan dukungan dalam proses menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
14. Kawan-kawan seperjuanganku dalam menyelesaikan jenjang pendidikan hingga di bangku perkuliahan yang sama-sama berjuang meraih gelar Sarjana Hukum, Mirella S., Kartika C., Himawan, Fitri M., Buana I., Nikolas W., Wienda K., Husnia L., Brian P., Galuh P., Selvia M, Mazda Radita, dan masih banyak lagi, terima kasih untuk pengalaman bersama di tahun-tahun kebersamaan yang luar biasa
15. Keluarga Besar KSP “Principium” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, terima kasih untuk ilmu, pengalaman, dan segala kesempatan dalam proses pembelajaran yang telah diberikan kepada Penulis. Kakak-kakakku KSP “Principium” yang telah melanjutkan kesuksesan di bidang masing-

masing, yakni: Miqdad A, Aprilia Ariyanti, Winjani Prita, Intan Permata, Galuh Wahyu, Aqmarina R, Dyah NA, Trisna D, Ardani N, Dyah Ayu, Fikriya, Nareswari, Novina, Icha, Hilda, Istining, Mira, Rifzky, Danang Eko, Diastama, Muh. Indra, Albertus B., Michael A., Shahnaz Hani, Bryan dan masih banyak Selain itu, tak lupa terima kasih kepada adik-adikku, yaitu Novia Yuli, Annisa Wulan, Sonia, Satria, Ikhsan, Tegar, Adit, Tamrin, Alfaini, Marcelina, Sulis, Wiwit, Iswari, Dewi P., Ulya, Dewi, Hida, Lely, Nabila, Andi dan masih banyak lagi yang senantiasa membagikan ilmu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

16. Keluarga Besarku Marto Sukarno dan Soeyahno Saputro, serta Joko Suyono yang senantiasa memberi cambuk kepada Penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
17. Keluarga baru KKN Blumbang, Dedi Suheimi, Sandra Embun, Kuswendari H, Taramita, Ratri Nurdiana, Lia Setyanisa, Mustafa N, dan Haidar Kunto yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam membantu Penulis.
18. Para Mentor Magang PGN, Atika D., Suryadi Wijaya, Muh. Edwin, Rachmat H. dan masih banyak lagi yang memberikan ilmu, pengalaman luar biasa, dan dukungan untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
19. M. Ahdiyar Syahrone dan Samekto Ambinonuso beserta staff-staff Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
20. Keluarga besar Angkatan 2011 serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi Penulis dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini.

Semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan dan pengembangan dunia hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Semoga pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin.

Surakarta, 16 Maret 2015

Penulis

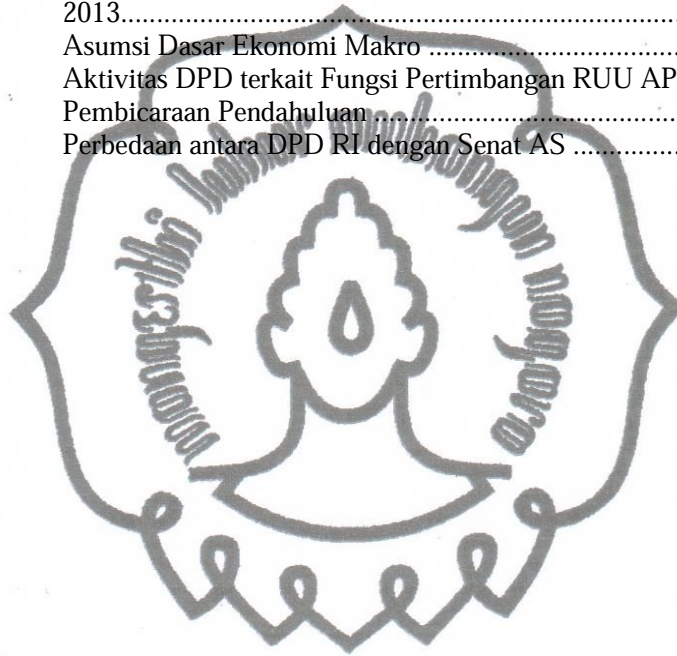
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Perwakilan Negara	15
a. Tinjauan tentang Sistem Perwakilan	16
b. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Legislatif	16
2. Tinjauan Umum Tentang Prinsip <i>Check And Balances</i>	22
3. Tinjauan Umum tentang Anggaran Negara	22
a. Tinjauan tentang Anggaran Negara	22
b. Tinjauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	26

(APBN)	
c. Tinjauan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah	28
B. Kerangka Pemikiran	30
 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fungsi <i>Budgeting</i> Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	32
B. Upaya Optimalisasi Fungsi <i>Budgeting</i> Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Dalam Menciptakan <i>Check And Balances</i>	56
 BAB IV. PENUTUP	
A. Simpulan	80
B. Saran	81
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I	Karakteristik Representasi Politik dan Representasi Daerah	21
Tabel II	Sistem Ketatanegaraan dan Model Lembaga Perwakilan Rakyat	38
Tabel III	Realisasi Belanja Negara APBN 2010-12 dan RAPBN 2013.....	48
Tabel IV	Asumsi Dasar Ekonomi Makro	49
Tabel V	Aktivitas DPD terkait Fungsi Pertimbangan RUU APBN Pembicaraan Pendahuluan	51
Tabel VI	Perbedaan antara DPD RI dengan Senat AS	55



DAFTAR LAMPIRAN

No.

1. Mekanisme Kerja Pertimbangan RUU APBN
2. Bagan Alur Pertimbangan DPD Terhadap RUU APBN
3. Bagan Alur Penyusunan Pertimbangan DPD Terhadap RUU tentang Perubahan APBN
4. Bagan Alur Penyusunan Pertimbangan DPD Terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
5. Putusan MK No. 92/PUU-X/2012

